

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.H. Rahadian, Et. Al., 2023. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LPPM Institut STIAM I.
- Ambarwati. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Al Qalam Media Lestari.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineck Cipta.
- Ishak. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.
- Salim HS. 2018. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

Al-Banna, H., Adiyanta, F. S., & Azhar, M. (2023). Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*.

Jeanne, D.N.M. (2014). Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia. *Promine*, Nomor 2, Vol. II.

Rachman, A. A., Amin, M. J., & Taufik, M. (2021). Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 156-166.

Reno Fitriyani. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, Nomor 1, Vol. 1.

Sam, A. F., Arifin, I., & Syamsu, S. (2024). Analisis Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kabupaten Bulukumba. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 1(1).

Gede Budi Suprayoga. (2008). Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan Pertambangan Batu bara. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Nomor .2, Vol. 19.

Sunny Ummul Firdaus. (2024). Reformasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *Jurnal KNAPHTN*, Nomor 1, Vo2. 1.

C. Skripsi

Dewi, U., 2023, "Pengawasan Pertambangan Pasir Darat Pada Pt. Energi Cahaya Makmur Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun", Disertasi Doktor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau.

Hasbi., 2021, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pasca Tambang Izin Usaha Pertambangan Pt. Bara Harmoni Batang Asam Kabupaten Bungo", Disertasi Doktor Universitas Jambi.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 yang mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Internet

WALHI Sumbar, “Warga Desa Sikalang dan WALHI Sumatera Barat Laporkan CV Tahiti *Coal* ke Menteri ESDM dan KPK”, melalui <<https://www.walhisumbar.org/warga-desa-sikalang-dan-walhi-sumatera-barat-laporkan-cv-tahiti-Coal-ke-menteri-esdm-dan-kpk/>> [25/05/2024].

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, “Mendorong Reformasi Regulasi sebagai Agenda Bersama”, melalui <<https://www.pshk.or.id/blog-id/mendorong-reformasi-regulasi-sebagai-agenda-bersama/>> [19/04/2025]